



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN SOSIAL  
**UNIT KERJA** : STAF AHLI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EDI SUHARTO
2. Jabatan : STAF AHLI MENTERI BIDANG PERUBAHAN DAN DINAMIKA SOSIAL
3. NHK : 145489

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.815.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m<sup>2</sup>/45 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
2. Tanah Seluas 846 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 79.500.000
3. Tanah Seluas 3090 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. Tanah Seluas 140 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m<sup>2</sup>/76 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 212 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
7. Bangunan Seluas 21 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000
8. Tanah Seluas 141 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 96.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 172.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 48.500.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.475.164.333
F. HARTA LAINNYA	Rp.	147.094.535
Sub Total	Rp.	3.658.258.868
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.658.258.868

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.